



Implementasi Kebijakan Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Pada Kabupaten Serang)

¹Nia Suganda, ²Arif Nugroho, ³Rahmi Mulyasih

*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ilmu Hukum,
Universitas Serang Raya,*

Abstract

This study aims to find out how the Implementation of the Implementation Policy for the Implementation of Private Indonesian Manpower Placement (PPTKIS) in the Banten Province Manpower and Transmigration Office (Study in Serang District) and what are the supporting and inhibiting factors in supervising the Supervision of the Implementation of Private Indonesian Manpower Placement (PPTKIS) in the Banten Province Manpower and Transmigration Office (Study in Serang District). In this study using descriptive qualitative. With the research location in the Banten Province Manpower and Transmigration Office in Serang District Supervision, data collection techniques used interviews, observation, and documentation. This study uses the widodo theory (2018) 4 (four) public policy supervision factors, namely: (1) Actors controlling the implementation of policies, (2) Standard operating control procedures, (3) Financial resources and equipment, (4) Scheduling of Control Implementation. From the results of research using Widodo's theory (2018) Supervision on PPTKIS has not been running optimally because there is no synergy between internal control and external control actors, the agency also has no control schedule, the socialization is quite good but there are still complaints from the community. .

Keywords: Policy Implementation, Public Policy Oversight

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang) dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pengawasan Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang). Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten bidang Pengawasan Kabupaten Serang, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori widodo (2018) 4 (empat) faktor pengawasan kebijakan publik yaitu: (1) Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan, (2) Standar prosedur operasi kontrol, (3) Sumber daya keuangan dan peralatan, (4) Jadwal Pelaksanaan Kontrol. Dari hasil penelitian yang dengan menggunakan teori widodo (2018) Pengawasan pada PPTKIS belum berjalan maksimal karena belum adanya sinergi antara pelaku kontrol internal dan pelaku kontrol eksternal, pihak dinas juga belum mempunyai jadwal kontrol, sosialisasi yang dilakukan sudah cukup baik namun masih terdapat keluhan dari masyarakatnya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengawasan Kebijakan Publik

^{*}Penulis Korespondensi

E-mail : niasuganda01@yahoo.com

PENDAHULUAN

Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebuah fenomena yang sudah biasa terjadi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di suatu daerah. Di provinsi Banten khususnya kabupaten serang, minat masyarakat untuk berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri masih sangat tinggi.

Pendaftaran untuk calon Tenaga Kerja Indonesia dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Disnakertrans melakukan kerja sama dengan PPTKIS dalam pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau lebih dikenal dengan singkatan (PPTKIS) adalah sebuah badan hukum terkait dengan cara untuk mendapatkan izin secara tertulis dari pihak pemerintah guna menyelenggarakan berbagai pelayanan penempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI untuk keluar negeri, dulu PPTKIS bernama Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Kabupaten Serang terdapat 7 Kantor cabang yang masa aktif Surat Pengantar Rekrut (SPR) nya masih berlaku sampai dengan 2019. 7 kantor cabang

ini diresmikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Adanya sejumlah kantor cabang yang dibuka di daerah masing-masing supaya mempermudah untuk para calon TKI mendaftarkan dirinya untuk pergi menjadi TKI ke luar negeri.

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2015-2018 terdapat perbedaan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Kabupaten Serang. Pada tahun 2015 535 orang, tahun 2016 353 tahun, tahun 2017 497 orang, 2018 393 orang. Terbagi menjadi dua jenis yaitu informal dan formal. Informal adalah mereka yang mendaftarkan diri untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, sedangkan formal adalah mereka yang mendaftarkan diri sebagai pekerja pabrik/konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada Pasal 92 tersebut Koordinator Wilayah Kabupaten Serang mempunyai kewajiban mengawasi perusahaan penempatan Tenaga Kerja, namun kenyataan yang ada dilapangan bahwa Koordinator Wilayah Kabupaten Serang tidak mengetahui adanya PPTKIS di Kabupaten Serang.

Menjadi kewajiban dari Disnakertrans melakukan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi untuk menjamin pelaksana peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dengan dukungan manajemen melalui optimalisasi fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan penataan prosedur mekanisme pengawasan dan memaksimalkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

perundangundangan dibidang ketenagakerjaan.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi pada Kabupaten Serang) dan untuk mengetahui apasaja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi pada Kabupaten Serang). Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi. Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, peneliti kemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi pada Kabupaten Serang) dan apasaja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi pada Kabupaten Serang).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin lebih mengetahui keadaan di lapangan yang sebenarnya dan melihat apakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten telah berjalan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Banten (Studi pada Kabupaten Serang)"

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

James Anderson (1984:3) dalam (Leo Agustino, 2012:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making* yaitu "serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan." Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud.

Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diraih. Hal ini tidak jauh dengan apa yang diutarakan Grindle (1980:5) dalam (Leo Agustino, 2012:129): pengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan tersebut tercapai.

Pengawasan

Menurut (Mukarom Zaenal, 2018:156) Pengawasan didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan

dengan standar tersebut dan mengambil tindakanpenyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Pengawasan Kebijakan Publik

Untuk dapat melakukan pengawasan secara optimal, maka pengawasan harus memiliki rencana yang baik. Menurut (Djoko Widodo, 2018:94-96), jika ingin merancang suatu strategi untuk melakukan kontrol pada suatu kebijakan, maka terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut: (1). Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dilihat dari asalnya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. (2) Standar Prosedur Operasi Kontrol Standard Operating Procedure (SOP) kontrol atas pelaksanaan kebijakan. (3). Sumber Daya Keuangan dan Peralatan Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping diperlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai. (4). Jadwal Pelaksanaan Kontrol Jadwal pelaksanaan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan juga sangat beragam. Setidaknya kontrol internal jadwal pelaksanaan kontrolnya dapat ditetapkan setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester sekali.

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau lebih dikenal dengan singkatan (PPTKIS) adalah sebuah badan hukum terkait dengan cara untuk mendapatkan izin secara tertulis dari pihak pemerintah guna menyelenggarakan berbagai

pelayanan penempatan bagi Tenaga Kerja. Tugas dan fungsi dari PPTKIS disini adalah sebagai pelaksana penempatan TKI yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal penempatan TKI ke luar negeri, baik pada saat pra penempatan, selama penempatan, maupun purna penempatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut (Satori Komariah, 2010:23) Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian dalam suatu konsep yang beragam, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya.

Penelitian ini berupaya mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang kompleks. Penelitian ini ditunjukan untuk mendapatkan gambaran atas Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi pada Kabupaten Serang).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis deskriptif kualitatif, peneliti mengacu pada Model Interaktif oleh (Miles dan Huberman dan Saldana, 2014: 14) dalam (Natalia, 2017). mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data

display, dan concluding drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, maka peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan "Implementasi Kebijakan Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi pada Kabupaten Serang)". Peneliti menggunakan teori Pengawasan Kebijakan Publik menurut (Djoko Widodo, 2018:94-96). Untuk dapat melakukan pengawasan secara optimal, maka pengawasan harus memiliki rencana yang baik. 4 (empat) faktor pengawasan kebijakan publik yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengawasan agar kegiatan pengawasan bisa berjalan secara optimal dan tidak berdampak pada tercapainya tujuan pengawasan kebijakan, yaitu: (1) Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan, (2) Standar prosedur operasi kontrol, (3) Sumber daya keuangan dan peralatan, (4) Jadwal Pelaksanaan Kontrol.

Data-data yang sudah diperoleh peneliti melalui data primer akan peneliti sajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan kenyataan dilapangan. Adapun datadata primer tersebut merupakan narasi hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Pengawasan PPTKIS.

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan

Dalam melakukan pengontrolan harus didukung dengan adanya data jumlah perusahaan. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa organisasi yang

bersangkutan mengenai Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dalam lingkup internal dan eksternal.

UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang dalam ketersediaan pelaku kontrol pengawasan masih dirasa kurang dan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang berada di Kabupaten serang dengan jumlah pengawas 15 orang tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Serang.

Dilihat dari hasil wawancara ketiga Dinas dan dikaitkan dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan mereka bisa dikatakan tidak adanya sinergi antara satu dengan yang lainnya karena UPTD tidak memiliki jumlah data PPTKIS di Kabupaten Serang dengan pernyataan tidak diberikan dari pihak Disnakertrans Provinsi Banten.

Dalam hal ini pelaku kontrol internal telah dijalankan oleh pihak Disnakertrans Provinsi Banten, Disnakertrans Kabupaten Serang, UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Serang dan BP3TKI telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai pelaku kontrol internal, kurangnya hanya tidak adanya sinergi antara satu dengan yang lainnya. Dan kendala lainnya dalam hal ini yaitu pelaku kontrol eksternal bahwasanya tidak adanya peran komponen masyarakat dalam melakukan pengontrolan terhadap PPTKIS. Dikarenakan ketidaktahuan pihak Desa Lebak Wangi terhadap kewenangannya sebagai pelaku kontrol eksternal.

Standar prosedur operasi kontrol

Dalam melakukan pengawasan memang seharusnya menjalankan sesuai SOP yang ada, menurut peneliti dalam hal pemberangkatan

TKI Disnakertrans Kabupaten Serang sudah menjalankan SOP pemberangkatan dengan baik. Karena TKI yang berangkat dan melaporkan keberangkatannya pada Disnakertrans Kabupaten Serang dijamin keamanannya. PPTKIS juga sudah mengetahui SOP dalam memberangkatkan TKI, dan juga sudah diadakan sosialisasi untuk TKI dan CTKI namun sosialisasi yang diadakan masih dikeluhkan beberapa pihak contohnya Penyedia Lapangan (PL) yang merasa tidak diundang pada sosialisasi yang diadakan.

Sumber daya keuangan dan peralatan

Dalam melakukan pengawasan sudah tersedia dan digunakan sebagai mana mestinya, namun pada bagian peralatan khususnya fasilitas transportasi yang disediakan oleh pemerintah yang dianggap masih kurang membuat pengawasan yang dilakukan menjadi terhambat. Sarana atau fasilitas tersebut salah satunya adalah alat transportasi seperti mobil untuk melakukan pengawasan. Seharusnya pemerintah menyediakan alat transportasi lebih agar terciptanya pengawasan yang baik dan agar tidak adalagi perusahaan yang tidak diawasi dengan alasan kekurangan alat transportasi dalam melakukan pengawasan pada perusahaan.

Jadwal Pelaksanaan Kontrol

jadwal pelaksanaan kontrol, Disnakertrans Kabupaten Serang dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang pun mengakui bahwa pengawasan terhadap PPTKIS belum maksimal karna tidak adanya jadwal untuk pengontrolan ke PPTKIS tersebut. Kurangnya komunikasi antara pelaku kontrol Internal dan Pelaku Kontrol eksternal. Pelaku Kontrol internal yaitu Dinas terkait

diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, belum adanya sinergi anatra ke 3 dinas tersebut menjadikan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal.

Faktor pendukung dalam melakukan pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Dalam implementasi kebijakan Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Pada Kabupaten Serang) terdapat beberapa faktor pendukung seperti Anggaran, dalam melakukan pengawasan anggaran sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan pengawasan. Anggaran yang dikeluarkan berasal dari APBD. Digunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Menurut pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dan UPTD pengawasan ketenagakerjaan anggaran untuk pengawasan sudah ada, dan digunakan sebagaimana mestinya. Dan Regulasi/Peraturan Perundang-undang, dalam melakukan pengawasan harus terikat dengan undang undang yang berlaku. Undangundang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Selain faktor pendukung Dalam implementasi kebijakan Pengawasan Pelaksana Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Pada Kabupaten Serang) terdapat pula beberapa faktor penghambat seperti Jumlah personil terbatas, tidak sebanding dengan jumlah obyek pengawasan (perusahaan), Fasilitas transportasi yang disediakan pemerintah terbatas, Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, Sistem informasi data kepengawasan belum terbangun maksimal, karena tidak semua pelaksana pengawas kebijakan mempunyai data mengenai jumlah perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengawasan pada PPTKIS belum berjalan maksimal karena belum adanya sinergi antara pelaku kontrol internal dan pelaku kontrol eksternal, hal ini menjadi penghambat dalam melakukan pengawasan. Pihak dinas pun belum mempunyai jadwal kontrol khusus dalam melakukan pengawasan pada PPTKIS. PPTKIS di survei hanya pada saat perpanjangan izin. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang sosialisasi yang dilakukan sudah cukup baik, hanya saja dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang pada tanggal 8 agustus 2019 belum seluruhnya di undang. Hal itu di keluhkan oleh pihak Penyedia Lapangan (PL) legal, karena yang diundang pada saat melakukan sosialisasi adalah sebagian warga dan beberapa RT, sedangkan yang harusnya diundang adalah orang orang yang paham terhadap

pemberangkatan TKI, seperti Penyedia lapangan atau orang orang yang terlibat dalam pemberangkatan TKI.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah. Saran tersebut antara lain : (1). Untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengawasan, seharusnya dibuat jadwal kontrol khusus pada PPTKIS. Sehingga tidak ada lagi perusahaan yang tidak melaporkan keberadaan perusahaannya. Sosialisasi yang dilakukan juga harus lebih tepat sasaran agar semua pihak yang terkait dalam pemberangkatan TKI paham terhadap peraturan yang berlaku. (2). Dan pada jumlah pengawas ketenagakerjaan seharusnya ditambah, agar pengawasan yang dilakukan berjalan dengan baik, dan tidak ada lagi perusahaan yang tidak diawasi. Karena dengan ditambahnya jumlah pengawas akan sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Serang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AG.Subarsono. (2013). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djoko Widodo. (2018). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Agustino. Leo. (2012). Dasar Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Muhlis, M. (2011). Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Mukarom Zaenal, L. W. M. (2018). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahya Anggara. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Satori Komariah, D. A. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2003). Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Sondang P. Siagian. (2003). Filasafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2015). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2016). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- William N Dunn. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPROVINSI JAWA TIMUR (Studi Pada Pra Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri)
- Meilasari Dwi Rahayu. Rizka Nur Amalia, H. L. (2013). PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN BREBES. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-1699.

Dokumen

- Daftar Seluruh Kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Provinsi Banten Tahun 2019.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
- Rekapitulasi Registrasi Berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten/Kota Serang dari tahun 2015 s/d 2018.

Jurnal

- Natalia, M. (2017). Jurnal Melta Online (03-01-17-03-37-35).
- Pramudiana, I. D. (2013). Kebijakan Pengawasan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Jejaring Administrasi Publik, 1, 241-257.
- Rahayu, M. D. (2013). PENGAWASAN TERHADAP PPTKIS (PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA) OLEH DINAS